

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta. UII Press.
- Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hasan. (2002). *Pengelompokan Data Disesuaikan Dengan Karakteristik Yang menyertainya*.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Muhammad Erwin. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung. PT Replika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Nandang Sudrajat. (2013). *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Nirahua Salmon E.M. (2013). *Hukum Pengolahan Perizinan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Penghantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Salim HS. (2006). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (1986). *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soehino dalam Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta. Grasindo.

Tri Haryati. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, 2015, “Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan” *Jurnal Hukum Unsyiah Kuala*, Vol 17 No 1, 2015.

Andri Yuna Ginting, 2018, “Prosedur Perolehan Izin Pertambangan dari Persepektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara*, Vol 1 Nomor 2, April 2018.

Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, dan Ade Arif Firmansyah, 2015, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, Vol 17 Nomor 3, Tahun 2015.

Erikson Sihotang, 2015, “Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran izin Usaha Pertambangan”, *jurnal Hukum Undiknas, Universitas Mahendradrata*, Vol 2 No 2, 2015.

Haris Agus Jratama Manik 2018, “Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah kota Yogyakarta”, *Jurnal UAJY* Vol 11 No 1, 2018.

Helmi Helmi, 2011, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal UNSOED*, Vol 11 No 1, 2011.

Marhaeni Ria Siombo, 2014, “Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan Dan Pertambangan”, *Jurnal Ilmu Hukum UNSOED*, Vol 14 No 3, 2014.

Nurul Laili Fadhilah, 2016, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 No 2, 2016

Ruli Kurnia, 2013, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan” *Jurnal Hukum UNRI*, Vol 11, No 1, 2013.

Suwari Akhamaddhian, 2014, “Reformasi Birokrasi Bidang perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Bogor)”, *Jurnal UNPAD Sosiohumaniora*, Vol 16 Nomor 2, 2014.

Karya Ilmiah

Jimly Asshiddiqie. "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia" .
Makalah disampaikan dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Satuan
Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten
Banjarnegara